

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis Tata Kelola Program Kartu Pra-kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi Pemberitaan Media Massa *Online* Pada Tahun 2020), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan pemberitaan media massa *online* pada tahun 2020 memiliki sisi positif dan negatif. Namun, meskipun demikian program ini terus berupaya untuk meningkatkan performanya dari gelombang ke gelombang dengan tujuan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat pelatihan kerja.
2. Tata Kelola Program Kartu Pra-kerja berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja sudah sesuai. Dimana pelaksanaannya sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Artinya tidak ada penyimpangan antara pelaksanaan dengan Perpres tersebut.
3. Program Kartu Pra-kerja sebagai program peningkatan kompetensi sekaligus penyaluran bansos dimasa pandemi bagi pesertanya sudah sesuai dengan pandangan *fiqh Siyasah Dusturiyah*. Dimana segala peraturan yang

diterbitkan oleh pemerintah didasarkan atas tujuan masalah. Islam menginginkan kesejahteraan bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu tugas pemerintah Islam dalam mencapai tujuan tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat salah satunya terkait peningkatan kemampuan diri.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan yang telah memaparkan analisis terkait penelitian yang telah dilakukan penulis serta sudah ditarik beberapa kesimpulan, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Meskipun secara yuridis normatif pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja sudah sesuai dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program kartu Pra-kerja. Dalam memaksimalkan pelaksanaan program sebaiknya pemerintah melibatkan Dinas Tenaga Kerja tiap daerah. Sehingga mereka tidak hanya membantu pendaftaran saja. Selain itu langkah lebih baiknya jika pemerintah juga mengimbangi program pelatihan kerja seperti ini dengan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan atau memberikan bantuan pinjaman modal bagi masyarakat yang ingin membuka usaha secara mandiri. Kemudian unsur bansos daripada program ini berlahan-lahan juga harus dihilangkan. Agar setiap lapis masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengembangkan

kompetensi tanpa mempertimbangkan apakah salah seorang anggota keluarganya sudah mendapatkan bansos dari kemensos

2. Bagi Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra-kerja

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program ini, hendaknya Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra-kerja untuk meningkatkan transparansi terkait alasan mengapa seseorang dinyatakan tidak lolos seleksi penerimaan program. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengikuti gelombang selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik mungkin. Memilih jenis pelatihan dengan serius sesuai dengan rencana karirnya. Sehingga pelatihan yang diambil bisa diterapkan kedepannya dan dapat dijadikan bekal kemampuan dalam mencari kerja atau berwirausaha. Jangan hanya memilih pelatihan secara asal hanya untuk mendapatkan insentif dari Program Kartu Pra-kerja ini.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.